

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis pengaruh empat variabel independen yaitu Pendidikan (E), Pengeluaran Pemerintah (GE), Pertumbuhan Ekonomi (G) dan Pengangguran (U) terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan berdasarkan persentase jumlah penduduk miskin (P). Penelitian ini memiliki rentang waktu penelitian dari tahun 2006 – 2015. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Model regresi kemiskinan memenuhi asumsi klasik dan dapat menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 0,849302. Secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Variabel Pendidikan (E) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan mengurangi kemiskinan.
- c. Variabel Pengeluaran Pemerintah (GE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya apabila pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka akan mengurangi tingkat kemiskinan.
- d. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (G) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya jika ada peningkatan pada pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan.

- e. Variabel Pengangguran (U) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya apabila jumlah pengangguran semakin tinggi maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan.
- f. Nilai individual effect dapat menghasilkan perilaku yang bervariasi pada tiap kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini menjelaskan tiga daerah yang memiliki nilai individual effect terbesar yaitu Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kabupaten Solok, kemudian tiga daerah yang memiliki pengaruh paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok.

## 6.2. Saran

Tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat perlu kebijakan yang tepat untuk menguranginya, maka dari itu pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang tepat sehingga kebijakan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus memperhatikan alokasi belanja pemerintah agar bisa digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan publik dan mampu membantu perekonomian masyarakat sehingga kemiskinan akan berkurang. Guna mencegah pembelanjaan yang tidak berguna, perlu pengawasan yang sangat ketat baik itu oleh pemerintah maupun peran bersama dari masyarakat. Sehingga pengeluaran pemerintah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.
- b. Untuk mengurangi angka kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat pemerintah perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mengurangi tingkat kemiskinan karena apabila

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penurunan angka gini ratio agar yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut tidak segelintiran orang saja, tetapi seluruh masyarakat atau dengan cara lain yaitu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

- c. Penurunan jumlah pengangguran merupakan sesuatu yang baik terhadap tingkat kemiskinan daerah Sumatera Barat. Akan tetapi perlu diperhatikan kembali apakah orang yang sebelumnya menganggur mendapatkan kerja yang layak. Untuk itu rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Provinsi di Sumatera Barat, perlu membuka lapangan pekerjaan yang memadai khususnya sektor informal, dengan cara membuka pelatihan pelatihan. Sehingga dengan soft skill yang dimiliki tenaga kerja bisa bekerja ditempat yang layak dan meningkatkan produktifitas dari tenaga kerja tersebut.

